

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kerja sama *fintech* antara Indonesia dan Thailand dalam pengembangan dan integrasi sistem pembayaran *Cross-border QR Code Payment* merupakan wujud nyata dari sinergi dua negara ASEAN dalam menghadapi tantangan digitalisasi keuangan. Didorong oleh kebutuhan untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi internasional, serta memperkuat ketahanan sistem pembayaran nasional, kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi digital kawasan. Dari sisi Indonesia, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjangkau kelompok masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, serta memperkuat peran UMKM dalam ekonomi digital. Sementara Thailand melihat kerja sama ini sebagai peluang memperluas adopsi teknologi keuangan dan memperkuat posisi sebagai pemimpin inovasi pembayaran digital di Asia Tenggara.

Kedua negara menunjukkan kesamaan visi dalam memanfaatkan *fintech* untuk membentuk sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan aman. Implementasi *Cross-border QR Code Payment* yang menghubungkan QRIS milik Indonesia dengan PromptPay milik Thailand menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan interoperabilitas lintas negara. Sistem ini memungkinkan pengguna di kedua negara melakukan transaksi secara *real-time* menggunakan mata uang lokal dengan skema *Local Currency Transaction (LCT)* dan mendukung pelaku UMKM, wisatawan, serta sektor e-commerce secara langsung.

Di samping itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta merupakan elemen penting dalam memperkuat fondasi sistem pembayaran lintas batas. Kemitraan strategis antara bank sentral, penyedia jasa pembayaran, operator teknologi, dan pelaku industri lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan teknis maupun operasional dalam proses integrasi sistem. Peran aktif lembaga-lembaga ini dalam menyelaraskan teknologi, kebijakan, dan pengembangan kapasitas

sumber daya menjadi kunci dalam membangun infrastruktur yang andal, inklusif, dan tangguh terhadap risiko.

Namun demikian, keberhasilan implementasi ini juga dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital di wilayah non-urban, belum meratanya literasi digital dan keuangan, serta keterbatasan jumlah *merchant* yang telah mengadopsi sistem pembayaran menggunakan QR Code. Perbedaan pendekatan regulasi antara kedua negara juga memerlukan harmonisasi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem. Inovasi teknologi yang dilakukan oleh kedua negara, seperti QRIS TUNTAS, QRIS Tap, PromptBiz, hingga proyek mBridge, mencerminkan respons proaktif dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang adaptif dan inklusif. Dalam ekosistem ini, regulator seperti Bank Indonesia dan Bank of Thailand tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem digital kawasan.

Sementara itu, dari aspek regulasi dan kebijakan, kolaborasi ini diperkuat oleh kerangka hukum nasional, seperti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 24/1/PADG/2022 dan *Payment Systems Act* B.E. 2560 milik Thailand, yang selaras dengan inisiatif regional seperti ASEAN Payment Connectivity. Harmonisasi regulasi, penguatan standar keamanan siber, serta kebijakan *pricing* dan perlindungan konsumen menjadi elemen fundamental dalam memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran lintas negara yang tengah dikembangkan kedua negara.

Meski integrasi *Cross-border QR Code Payment* antara Indonesia dan Thailand menunjukkan kemajuan yang signifikan, disparitas jumlah transaksi antara kedua negara masih menjadi tantangan yang mencolok. Data menunjukkan bahwa transaksi *outbound* dari Indonesia ke Thailand cenderung lebih dominan dibandingkan transaksi *inbound* dari Thailand ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan mobilitas wisatawan Indonesia ke Thailand, ketidakmerataan adopsi teknologi digital *merchant* di Indonesia, serta

preferensi wisatawan Thailand yang masih terbatas dalam menggunakan sistem pembayaran digital di Indonesia.

Menurut penulis, kerja sama ini tidak hanya relevan dalam konteks peningkatan efisiensi transaksi lintas batas, tetapi juga memiliki makna strategis yang lebih luas dalam membentuk ekosistem ekonomi digital kawasan yang inklusif dan berdaulat. Integrasi sistem pembayaran *Cross-border QR Code Payment* antara Indonesia dan Thailand merupakan model awal dari bagaimana negara-negara ASEAN dapat berkolaborasi dalam menjawab tantangan globalisasi finansial. Penulis memandang bahwa inisiatif ini berpotensi menjadi fondasi bagi transformasi digital lintas sektor yang lebih luas, seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, hingga mobilitas tenaga kerja.

Selain itu, keberhasilan kerja sama ini juga memperlihatkan pergeseran diplomasi ekonomi kedua negara dari pendekatan konvensional menuju diplomasi berbasis inovasi dan konektivitas digital. Dengan kata lain, penguatan interoperabilitas sistem pembayaran merupakan langkah awal menuju kedaulatan digital kawasan yang mampu memperkecil ketergantungan pada sistem keuangan global yang tidak selalu berpihak pada negara berkembang. Secara keseluruhan, kerja sama Indonesia-Thailand dalam implementasi *Cross-border QR Code Payment* tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi model kolaborasi regional yang dapat direplikasi di tingkat ASEAN. Kolaborasi ini berkontribusi besar terhadap integrasi ekonomi digital, mendorong penggunaan mata uang lokal, dan menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem pembayaran yang saling terhubung dan berkelanjutan di kawasan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pembuat kebijakan, pelaku industri pembayaran digital, dan regulator di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dan Thailand, dalam merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kerja sama sistem pembayaran lintas batas.

Menurut penulis, kerja sama seperti Cross-border QR Code Payment tidak hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga merupakan instrumen diplomasi ekonomi digital yang harus dirancang dengan mempertimbangkan kesetaraan akses, perlindungan data pengguna, serta keberlanjutan inovasi teknologi.

Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada perluasan jangkauan infrastruktur di wilayah urban, tetapi juga menjadikan wilayah non-urban sebagai prioritas dalam distribusi akses dan literasi keuangan digital. Penulis juga melihat perlunya peran aktif sektor swasta untuk lebih terlibat dalam edukasi dan promosi penggunaan sistem pembayaran lintas negara, baik melalui insentif merchant, kolaborasi startup fintech, maupun pendekatan berbasis komunitas. Dengan langkah tersebut, kerja sama seperti ini dapat benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi fondasi kuat bagi integrasi ekonomi digital ASEAN secara menyeluruh.

6.2.2 Saran Akademis

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kerja sama bilateral dalam ranah ekonomi digital, dengan fokus pada implementasi *Cross-border QR Code Payment* antara Indonesia dan Thailand. Menurut penulis, pendekatan ini masih jarang dikembangkan secara spesifik dalam literatur hubungan internasional di Indonesia, khususnya dalam membahas diplomasi digital, integrasi sistem keuangan regional, dan transformasi peran bank sentral sebagai aktor dalam diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi dasar atau rujukan awal bagi kajian akademik selanjutnya yang ingin mendalami peran *fintech* sebagai instrumen diplomasi ekonomi kawasan, serta mengeksplorasi keterkaitan antara inovasi teknologi dan strategi politik luar negeri negara berkembang di era digital.

Dengan adanya batasan periode penelitian dari tahun 2022 hingga tahun 2024, penulis mendorong agar studi ini dapat dilanjutkan dengan analisis terhadap fase-fase selanjutnya, terutama melihat dampak jangka

menengah dari implementasi QRIS–PromptPay terhadap struktur perdagangan, investasi digital, dan stabilitas keuangan regional.

Penulis juga melihat pentingnya penelitian lanjutan yang menyoroti bagaimana isu-isu seperti privasi data lintas negara, pengaruh CBDC (*Central Bank Digital Currency*), serta dinamika geopolitik digital di kawasan ASEAN akan membentuk arah baru dari kerja sama sistem pembayaran lintas batas. Jika dalam beberapa tahun ke depan terdapat perubahan kepemimpinan nasional atau transformasi regulasi besar di Indonesia maupun Thailand, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan arah kerja sama dan reposisi kebijakan keuangan digital di kawasan. Penulis melihat bahwa studi tentang diplomasi teknologi dan kerja sama ekonomi digital akan menjadi ranah yang semakin penting dan relevan dalam kajian hubungan internasional kontemporer, khususnya di tengah meningkatnya interdependensi antar negara di era pascapandemi.